

**“PERSEPSI MASYARAKAT ATAS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PEMERINTAH ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
( Studi Kasus Pada Desa Tanjung Perada Kecamatan Tempunak Kabupaten  
Sintang)”**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH**

**VETRONELA DEL VIANA**

**12190518**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi  
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi



**DISUSUN OLEH  
VETRONELA DELVIANA  
12190518**

**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vetronela Delviana  
NIM : 12190518  
Program studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Persepsi Masyarakat Atas Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah  
Atas Pengelolaan Keuangan Desa  
( Studi Kasus Pada Desa Tanjung Perada Kecamatan Tempunak  
Kabupaten Sintang)”**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 01 Desember 2023

Yang menyatakan



(Vetronela Delviana)

Nim 12190518

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan

**“Persepsi Masyarakat Atas Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Atas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tanjung Perada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**VETRONELA DELVIANA**

12190518

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 3 Oktober 2023

Nama Dosen

Tanda Tangan

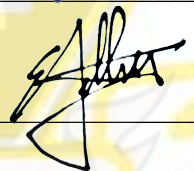
1. Dielanova Wynni Yuanita, S.E., M.Sc, BPK  
(Ketua Tim Penguji)



2. Christine Novita Dewi, SE., M.Acc., Akt., CA.,  
CMA., CPA  
(Dosen Penguji)



3. Eka Adhi Wibowo, SE., M.Sc.  
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.

Ketua Program Studi Akuntansi



Rossalina Christianti, S.E., M.Acc.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini yang berjudul :

**“Persepsi Masyarakat Atas Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Atas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tanjung Perada, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang)”**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil duplikasi dari pihak lain di Perguruan Tinggi atau Institusi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika kemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenakan sanksi yaitu pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 18 Juli 2023



Vetronela Delviana

## HALAMAN MOTTO

“Ketika aku melibatkan Tuhan semua rencana dan impianku, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih”

-Papa

Setetes keringat orang tuaku seribu langkahku untuk maju

Aku punya Tuhan, Aku baik-baik saja

Filipi 4:13

Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah

langkahnya

Amsal 16:9

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

Amsal 23: 18

*“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it true”*

Taylor Swift

DUTA WACANA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Skripsi ini penulis persembahkan untuk**

Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah memberikan segala anugerah- Nya

Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Semoga sehat dan bahagia selalu.

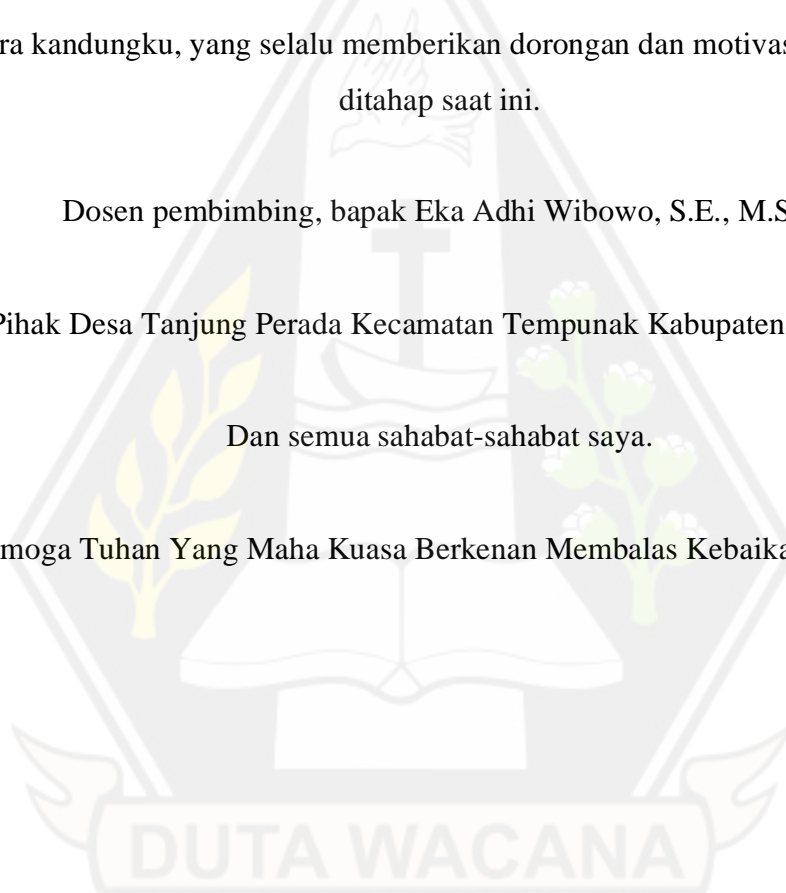
Saudara kandungku, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ditahap saat ini.

Dosen pembimbing, bapak Eka Adhi Wibowo, S.E., M.Sc.

Pihak Desa Tanjung Perada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

Dan semua sahabat-sahabat saya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Berkenan Membalas Kebaikan Kalian.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberikan saya kekuatan, rahmat kesehatan dan membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia dan kemudahan yang Tuhan berikan, akhirnya skripsi ini selesai dengan baik.

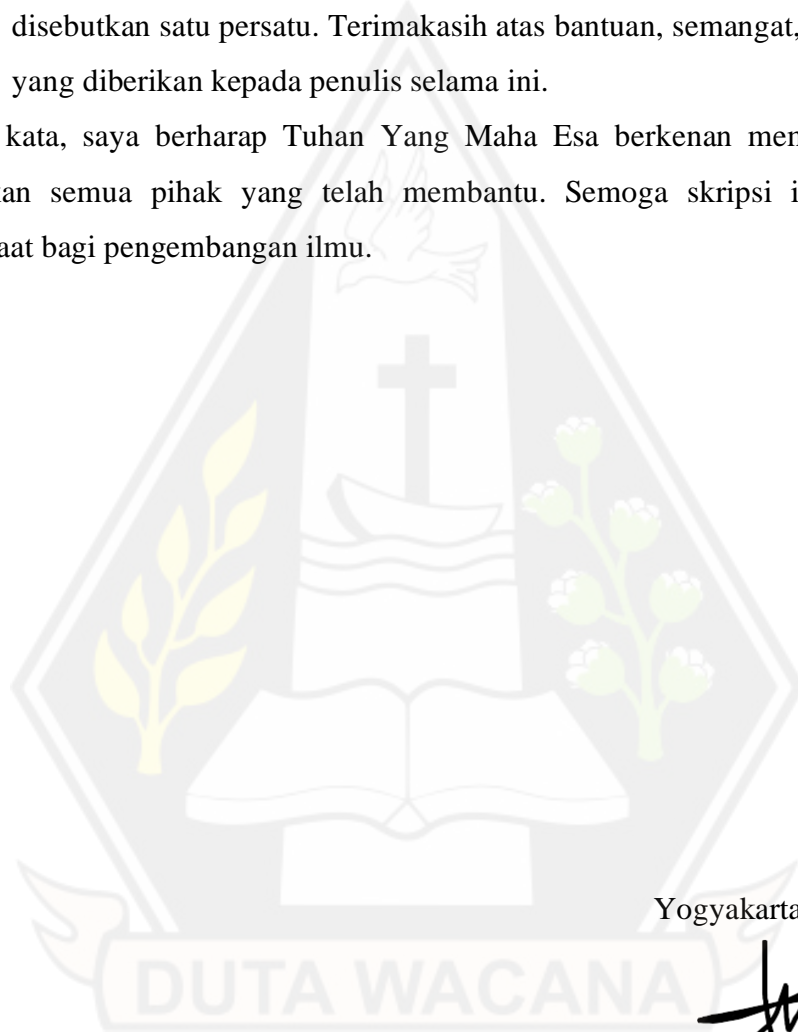
1. Dr. Perminas Pangeran, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana;
2. Christine Novita Dewi, S.E., M.Acc., Akt., CA., CMA., CPA, selaku ketua program studi Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana;
3. Eka Adhi Wibowo, S.E., M.Sc, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Pihak Kantor Desa Tanjung Perada yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh informasi yang saya perlukan;
5. Dosen-dosen penguji skripsi;
6. Yang istimewa saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua yang saya cintai. Laki-laki dan perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat dan membuat saya bangkit dari kata menyerah dengan memberikan motivasi, mendoakan dan memberikan dukungan dengan penuh sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk diri sendiri, saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri yang merupakan kebahagiaan tersendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, terimakasih telah percaya pada diri sendiri bahwa bisa melalui semua ini, terimakasih sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.
8. Frendy Justin yang selalu menjadi pendengar yang baik, menjadi inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi *support system* penulis dalam masa



perkuliahan. Terimakasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan dan sabar untuk memberikan semangat.

9. Sahabat penulis, Laura Saswita, Acai, Feni, Regitha, Eva, Niko, Frengky, Ihut, yang telah banyak membantu dan bersama proses penulis dalam masa perkuliahan. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. *See you on top guys.*
10. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



Yogyakarta, 18 Juli 2023

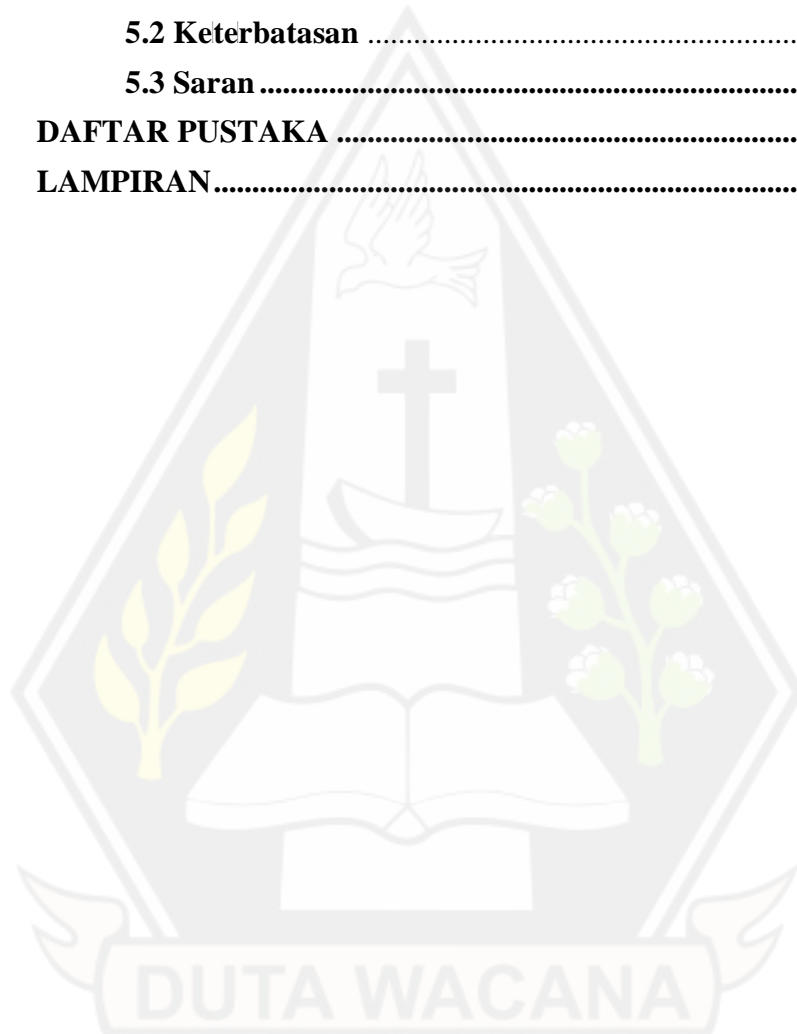
Vetronela Delviana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Kontribusi Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Batasan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Landasan Teori.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1 Teori Persepsi (<i>Perception Theory</i>) .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.2 Gender dan Persepsi Masyarakat Desa.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.3 Usia dan Persepsi Masyarakat Desa .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.4 Tingkat Pendidikan dan Persepsi Masyarakat Desa.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.5 Akuntabilitas .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.6 Transparansi .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1.8 Keuangan Desa .....</b>	<b>20</b>
<b>2.1.9 Standar Akuntansi Pemerintah Desa.....</b>	<b>21</b>
<b>2.2 Pengembangan Hipotesis .....</b>	<b>25</b>
<b>2.2.1 Gender Dan Persepsi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. ....</b>	<b>25</b>
<b>2.2.2 Usia Dan Persepsi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.....</b>	<b>26</b>

2.2.3	Tingkat Pendidikan Dan Persepsi Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Desa.....	27
2.3	Model Penelitian.....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>28</b>
3.1	Data dan Sumber .....	28
3.1.1	Populasi dan Sampel.....	28
3.1.2	Sumber Data .....	28
3.1.3	Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.2	Variabel Penelitian.....	29
3.2.1	Variabel Dependen (Y).....	29
3.2.2	Variabel Independen (X) .....	30
3.3	Defenisi Variabel dan Pengukurannya .....	30
3.3.1	Persepsi Masyarakat .....	30
3.3.2	Gender .....	30
3.3.3	Usia .....	31
3.3.4	Tingkat Pendidikan .....	32
3.4	Desain Penelitian .....	33
3.5	Gambaran Umum Desa.....	34
3.5.1	Kondisi Geografis.....	34
3.5.2	Kondisi Demografis .....	34
3.5.3	Kondisi Ekonomi.....	36
3.6	Teknik Analisis dan Data Kuantitatif.....	36
3.6.1	Statistik Deskriptif .....	36
3.6.2	Uji Validitas .....	36
3.6.3	Uji Reabilitas .....	36
3.7	Pengujian Hipotesis .....	37
3.7.1	Uji <i>Mann-Whitney</i> .....	37
3.7.2	Uji Korelasi Rank Spearman .....	37
3.8	Deskripsi Subjek Data Kualitatif.....	38
3.8.1	Informan I .....	38
3.8.2	Informan II .....	38
3.8.3	Informan III.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>39</b>
4.1	Data Responden.....	39
4.2	Analisis Data Kuantitatif .....	41
4.2.1	Uji Validitas .....	41

4.2.2	Uji Reliabilitas .....	42
4.3	Analisis Data Kualitatif.....	45
4.3.1	Pengujian Keabsahan Data .....	45
4.3.2	Pengkodean Data.....	45
4.3.3	Interpretasi.....	50
4.4.	Rangkuman.....	51
<b>BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....</b>		<b>53</b>
5.1	Kesimpulan .....	53
5.2	Keterbatasan .....	54
5.3	Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>61</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 3. 1 Hasil Pengukuran Persepsi.....	30
Tabel 3. 2 Kode Gender .....	31
Tabel 3. 3 Kode Usia .....	32
Tabel 3. 4 Kode Tingkat Pendidikan.....	32
Tabel 3. 5 Jumlah Individu Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	34
Tabel 3. 6 Jumlah Individu Berdasarkan Agama .....	35
Tabel 3. 7 Jumlah Sarana Prasarana Kantor .....	35
Tabel 3. 8 Jumlah Tempat Ibadah.....	35
Tabel 3. 9 Jumlah Layanan Kesehatan .....	35
Tabel 3. 10 Jumlah dan Jenis Mata Pencaharian.....	36
Tabel 4. 1 Data Pembagian Kuisisioner .....	39
Tabel 4. 2 Gender ( Jenis Kelamin ) .....	39
Tabel 4. 3 Usia .....	40
Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan .....	40
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas (65 Responden) .....	41
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas (Persepsi Akuntabilitas Dan Transparansi Atas Pengelolaan Keuangan Desa) .....	42
Tabel 4. 7 Hasil Uji Mann- Whitney (X1).....	43
Tabel 4. 8 Hasil Uji Korelasi Spearman (X2).....	43
Tabel 4. 9 Hasil Uji Korelasi Spearman (X3).....	44
Tabel 4. 10 Pertanyaan Wawancara.....	45
Tabel 4. 11 Rangkuman Hasil Penelitian.....	51

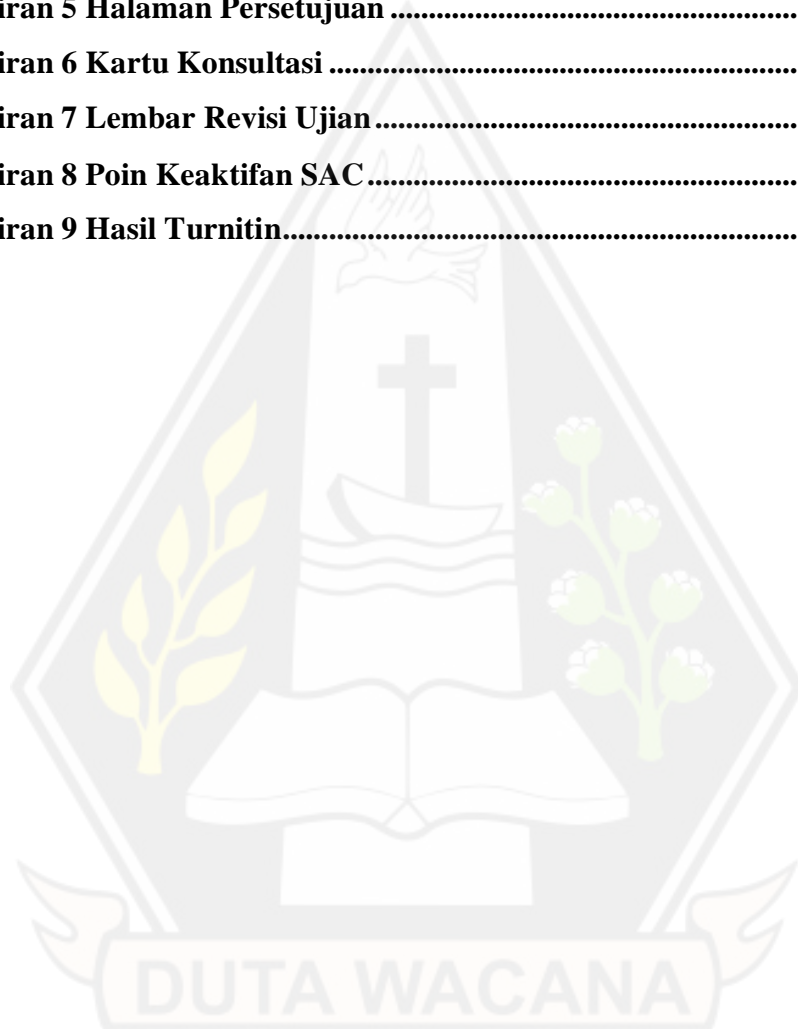
## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....</b>	<b>16</b>
<b>Gambar 2. 2 Perencanaan dan Penganggaran Desa.....</b>	<b>18</b>
<b>Gambar 2. 3 Alur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa .....</b>	<b>20</b>
<b>Gambar 2. 4 Model Penelitian.....</b>	<b>27</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kuesioner .....	61
Lampiran 2 Hasil Uji Validitas, Reliabilitas, Man-Whitney dan Korelasi Rank-Spearman.....	66
Lampiran 3 Hasil Kuesioner .....	71
Lampiran 4 Transkrip Wawancara .....	80
Lampiran 5 Halaman Persetujuan .....	84
Lampiran 6 Kartu Konsultasi .....	85
Lampiran 7 Lembar Revisi Ujian .....	87
Lampiran 8 Poin Keaktifan SAC .....	88
Lampiran 9 Hasil Turnitin.....	89



**“PERSEPSI MASYARAKAT ATAS AKUNTABILITAS DAN  
TRANSPARANSI PEMERINTAH ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA  
( Studi Kasus Pada Desa Tanjung Perada Kecamatan Tempunak Kabupaten  
Sintang)”**

**Vetronela Delviana**

**12190518**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis**

**Universitas Kristen Duta Wacana**

**Email : [Vetronela674@Gmail.Com](mailto:Vetronela674@Gmail.Com)**

**Abstrak**

**Kata kunci :** Persepsi, akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perbedaan persepsi masyarakat desa Tanjung Perada kecamatan tempunak kabupaten sintang terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa ditinjau dari faktor gender, usia dan tingkat Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mix method*) dengan strategi eksplanatoris sekuensial, yaitu penggabungan Teknik penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan data primer. Sampel penelitian ini adalah 65 masyarakat desa tanjung perada. Hasil uji *man-whitney* menunjukkan bahwa gender tidak berkorelasi dengan persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Uji korelasi *Rank – Spearman* menunjukkan bahwa usia tidak memiliki hubungan dengan persepsi masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, dan pada tingkat Pendidikan tidak memiliki hubungan dengan persepsi masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Metode kualitatif yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil wawancara dengan menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian kuantitatif.



**“PUBLIC PERCEPTION OF GOVERNMENT ACCOUNTABILITY AND  
TRANSPARENCY FOR VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT  
(Case Study in Tanjung Perada Village, Tempunak District, Sintang  
Regency)”**

**Vetronela Delviana**

**12190518**

**Accounting Study Program, Faculty of Business**

**Duta Wacana Christian University**

**Email: Vetronela674@Gmail.Com**

**Abstract**

*This research aims to analyze and understand differences in perceptions of the people of Tanjung Perada village, Tempunak sub-district, Sintang district regarding accountability and transparency in village financial management in terms of gender, age and education level factors. This research uses a mixed method with a sequential explanatory strategy, namely combining quantitative and qualitative research techniques with primary data. The sample for this research was 65 residents of Tanjung Perada village. The results of the Man-Whitney test show that gender does not correlate with public perceptions of accountability and transparency in financial management. The Rank - Spearman correlation test shows that age has no relationship with community perceptions regarding accountability and transparency in village financial management, and at the education level it has no relationship with community perceptions regarding accountability and transparency in village financial management. The qualitative method used is descriptive analysis using interviews as a data collection technique. The results of the interviews showed results that were in line with quantitative research.*

**Keywords:** *Perception, accountability, transparency and village financial management.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntansi sektor publik dalam perkembangannya disebut sebagai akuntansi dana publik, hal ini merupakan cara dari akuntansi dan mekanisme yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga tertinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial, ataupun proyek kerjasama publik-swasta. Akuntansi sektor publik adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah sehubungan dengan keputusan keuangan yang diperlukan oleh pihak eksternal (Dwi Ratmono, 2015). Di dalam suatu akuntansi sektor publik, data yang digunakan adalah data akuntansi dan bertujuan untuk memberikan informasi tentang keadaan ekonomi dan keadaan keuangan di dalam suatu sektor publik tersebut kepada otoritas eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta publik. Selain itu, akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana untuk melaporkan kepada publik, masyarakat menuntut agar badan akreditasi dilaksanakan secara transparan dan juga akuntabel. Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada akhirnya akan memberikan kerangka kerja untuk berfungsinya tahapan siklus akuntansi Sektor Publik. Siklus mana yang meliputi semua urutan cara mulai dari sebuah persiapan, perkiraan, penerapan anggaran, penyediaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan akuntabilitas publik.

Pemerintah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya reformasi khususnya dalam otonomi daerah, yang mana ilmu akuntansi sangat berkembang dalam akuntansi pemerintah, sehingga akuntansi lingkungan pemerintah daerah dikhususkan untuk pencatatan transaksi dan pelaporan hasil pemerintahan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas yang dimana pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan proses pengelolaan sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaporan serta dapat memberikan informasi keuangan yang jujur kepada publik dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa bertanggung jawab secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota seperti kepada gubernur/wali kota. Sementara itu, tanggung jawab secara horizontal terletak pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, peran sistem akuntansi desa sangat berguna dalam pengelolaan, perencanaan, pengendalian dan pelaporan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) yang digunakan untuk membiayai program atau infrastruktur desa seperti proyek APBD diperoleh dari publik, dan non-infrastruktur seperti pendidikan, budaya tradisional, peningkatan tenaga kerja daerah dan pendapatan desa melalui aset desa. Pemerintah desa juga harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun (2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Selain itu, fungsi dari Pemerintah Desa adalah melaksanakan amanah dari masyarakat desa secara bertanggung jawab dan akuntabel. Dengan adanya hal ini masyarakat dapat menilai kinerja perangkat desa yang ada di pemerintahan desa secara langsung, jika kinerja baik maka akan ada apresiasi dari masyarakat dalam kinerja tersebut, namun bila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkap kepada masyarakat maka pemerintah desa belum mewujudkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat umum.

Persepsi merupakan sekumpulan proses yang menyebabkan individu menjadi sadar akan lingkungannya dan kemudian menginterpretasikannya (Moorhelad dan Griffin, 1989 dalam Jonels, 1992). Menurut Robbin (1995) persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensori mereka untuk memberi makna atas lingkungannya.

Masyarakat merupakan salah satu pilar demokrasi. Semua kebijakan dalam negara demokrasi dilakukan dengan hati nurani dan aspirasi rakyatnya. Masyarakat menjadi elemen negara yang menjadi sasaran dan merasakan secara langsung dampak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari sejahtera, adil, dan makmur, sehingga pandangan masyarakat menjadi

hal yang tidak dapat dihindari. Demikian pula dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, pandangan dan makna yang masyarakat pahami dapat menjadi gambaran aspirasi dan harapan sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mencapai tujuan bersama.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisikal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisikal, informasi, dan penjabarannya (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Desa merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang menjadi salah satu pokok pembangunan pemerintahan karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan. Desa adalah bentuk pemerintahan terendah dan ujung tombak dalam melakukan pembangunan diharapkan dapat melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya salah satunya adalah pengelolaan perekonomian desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Desa berperan penting sebagai mitra (*partner*) pada saat ini dan pada saat yang akan mendatang bagi pembangunan kota adalah sebagai tenaga penggerak pembangunan kota, maka

perlu adanya dukungan seperti sumber daya manusia yang berkualitas, dana, sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang.

Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa tercermin dalam laporan keuangan pemerintahan desa. Terkait hal ini, pemerintah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab, melakukan pembinaan dan pengawasan dengan menerbitkan pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan desa yang memadai, laporan keuangan desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Desa (SAPDesa). Penyusunan SAPDesa dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang saat ini menjadi signifikan setelah adanya dana desa. Kebutuhan ini teridentifikasi pada rapat pleno bersama Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan juga harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum dan wajar.

Akuntansi di desa hadir sebagai sebuah reformasi dibidang keuangan, yang dihasilkan dari paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik. Akuntansi desa bisa diartikan sebagai catatan dari proses transaksi yang ada di desa lalu dibuktikan dengan nota-nota untuk kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak terkait. Sehingga akuntansi desa menjadi seperangkat sistem dan kebijakan akuntansi yang memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangannya sebagai pengelola dana publik yang diberikan oleh masyarakat. Akuntansi desa di sini memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pengelolaan dana desa dari pemerintah pusat agar terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik khususnya pada keuangan desa. Dengan adanya akuntansi desa, pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel dan transparan sehingga dana desa dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Tanjung Perada merupakan salah satu desa di Kecamatan Tempunak, Desa Tanjung Perada memiliki dana desa yang cukup besar, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mengelola laporan keuangan perlu adanya akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Dalam tahapan akuntabilitas pemerintah desa bisa diungkapkan melalui papan informasi ataupun dirapat dan musyawarah pembangunan desa dan dalam tahapan transparansi wajib menyampaikan pendapatan dan pengeluaran desa sehingga masyarakat mengetahui hal tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah transparansi pengelolaan keuangan sudah dilakukan tetapi belum maksimal, dikarenakan beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa. Laporan yang disampaikan kepada masyarakat hanya biaya umum terkait biaya pembangunan, biaya terkait urusan ke dalam seperti (perlengkapan kantor, perjalanan dinas, honorarium, dan sebagainya) hanya diketahui secara internal saja oleh pemerintah desa. Kemudian, dana yang ada di lapangan seperti laporan pengelolaan dana desa yang ada di *website* belum terupdate tepat waktu.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir sebagai kebijakan afirmatif atas tuntutan serta tekanan publik (Nata, 2017). Berdasarkan regulasi tersebut, desa memiliki pendapatan yang tidak lagi kecil seperti era sebelumnya, peluang ini harus dapat dioptimalkan oleh desa untuk dapat memberdayakan dirinya agar memiliki kemandirian, kemampuan untuk melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan yang menunjukkan prakarsa pembangunan yang dimulai dari desa. Begitupun dengan hasil dari evaluasi atas pelaksanaannya, kebijakan dana desa telah terbukti dapat menghasilkan capaian yang dapat berguna untuk masyarakat, yang diantaranya berupa infrastruktur jalan desa 95,2 ribu kilometer; kemudian jembatan sepanjang 914 ribu meter; sarana air bersih 22.616 unit; 2.201 dermaga; 14.957 dan lainnya yang sangat menunjang kehidupan di desa (Buku Saku Dana Desa, 2017). Akan tetapi secara nasional, capaian ini belum tuntas implementasinya, masih ada hal-hal yang dapat menjadi penghambat pencapaian dalam implementasi kebijakan, hal tersebut terlihat pada periode 2018, telah tercatat 900 kasus yang menjerat para perangkat desa di Indonesia yang terindikasi telah menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan dana desa (Merdeka, 2021).

Kasus dana desa yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat, salah satunya Desa X Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat (Lombok Post, 2020) yang menjadi *setting* penelitian ini. Desa X setiap tahunnya dapat anggaran dana desa ataupun alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa itu sendiri, namun dalam pengelolaannya ditemukan adanya penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa dan sekretaris desa. Sesuai dengan hasil putusan dengan Nomor Perkara 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN MTR menyatakan bahwa SH sebagai mantan kepala desa dan BH sebagai sekretaris desa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Keduanya dikenakan denda masing-masing Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. Kedua terdakwa juga turut dibebankan uang pengganti kerugian negara masing-masing sebesar Rp 287,98 juta. Di mana, uang pengganti negara tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dari korupsi anggaran dana desa yang nilainya sebesar Rp 575,96 juta dari total anggaran sebesar Rp 1,8 miliar (Pengadilan Negeri Mataram, 2022). Dana tersebut ada yang dialokasikan untuk proyek pembangunan dan pembangunan fiktif. Dimana pembangunan tersebut telah ada laporannya, namun bentuk fisik dari pembangunan tersebut justru tidak ada. Kemudian, sebagian dana tersebut juga digunakan untuk *mark-up* harga yang dalam laporannya harga dibuat tidak sesuai dengan harga sebenarnya.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Dengan adanya penerapan akuntansi pada pemerintahan desa yang mana dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa mengingat besarnya jumlah dana desa yang diterima tentunya membantu pemerintah desa dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan supaya mudah untuk dipertanggungjawabkan dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal dengan harapan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan. *Good Governance* merupakan suatu pelaksanaan manajemen pembangunan yang pasti dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga *Good Governance* berperan sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan dana investasi dan mencegah korupsi, baik secara

politik maupun administratif. Untuk mencapai *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan maka prinsip-prinsip *Good Governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan, prinsip ini meliputi : partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparansi, kesetaraan semua warga, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategi. World Bank (Haryanto, 2007) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Persepsi Masyarakat atas Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah atas Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus pada Desa Tanjung Perada, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Akuntabilitas Desa Tanjung Perada Kecamatan Tempunak sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)?
2. Apakah Transparansi Desa Tanjung Perada sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji Akuntabilitas pada Desa Tanjung Perada Kecamatan Tempunak berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Desa (SAPDesa).
2. Untuk menguji Transparansi pada Desa Tanjung Perada Kecamatan Tempunak berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).
3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

## **1.4 Kontribusi Penelitian**

- a. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mengkonfirmasi atau mengembangkan teori dibidang



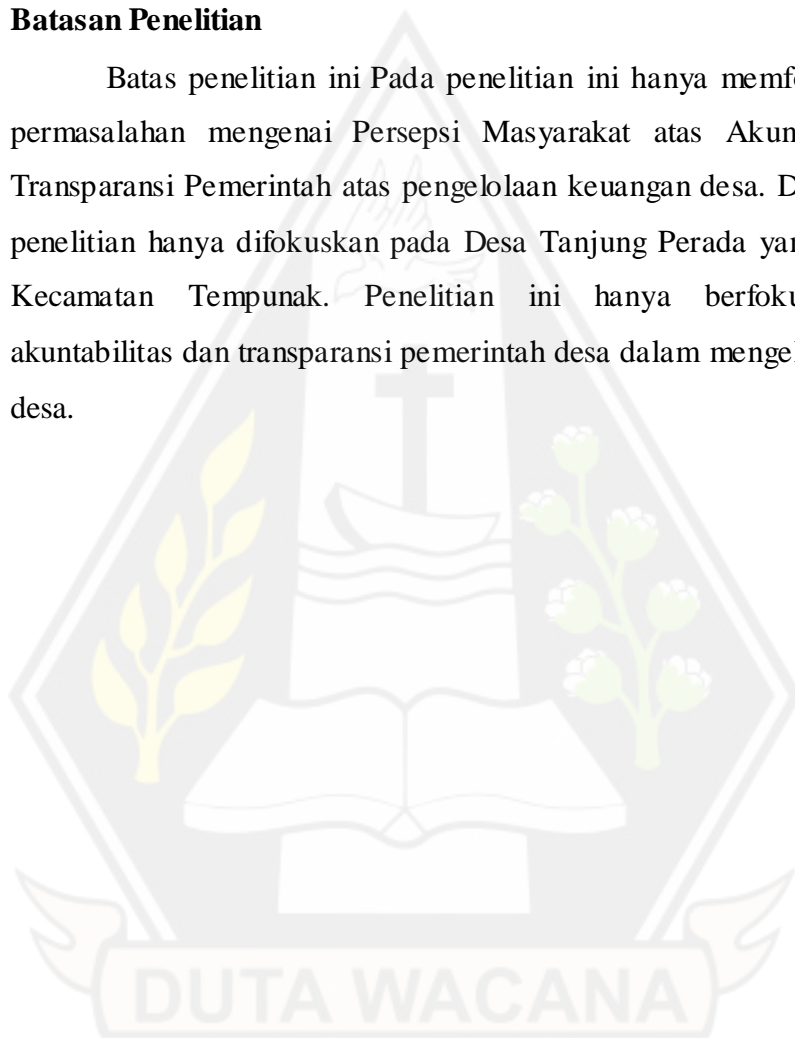
literatur akuntansi sektor publik khususnya terkait dengan persepsi, akuntabilitas, dan transparansi.

b. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pelaku organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan desa yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi secara signifikan.

### 1.5 Batasan Penelitian

Batas penelitian ini Pada penelitian ini hanya memfokuskan pada permasalahan mengenai Persepsi Masyarakat atas Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah atas pengelolaan keuangan desa. Dimana objek penelitian hanya difokuskan pada Desa Tanjung Perada yang terdapat di Kecamatan Tempunak. Penelitian ini hanya berfokus mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.



## BAB V

### KE Simpulan, Keterbatasan dan Saran

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pengambilan data melalui kuesioner kepada masyarakat desa Tanjung Perada untuk pengumpulan data kuantitatif dan melakukan wawancara kepada 3 orang narasumber yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk pengumpulan data kualitatif maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Gender menunjukkan koefisien signifikansi sebesar  $0,066 > 0,05$  artinya menolak hipotesis ke-1, dengan demikian perbedaan gender didalam desa tidak memiliki korelasi terhadap persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan tentang persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan desa diantara laki-laki dan perempuan. Kemudian didukung dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara informan laki-laki dan perempuan mengenai persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan desa Tanjung Perada.
- b. Usia menunjukkan  $0.624 > 0,05$  artinya menolak hipotesis ke-2, dengan demikian usia masyarakat desa Tanjung Perada tidak memiliki korelasi terhadap persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan desa. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat desa yang berbeda usia tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan desa. Kemudian hal ini didukung dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa usia masyarakat desa Tanjung Perada tidak memiliki korelasi terhadap persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan desa Tanjung Perada.

- c. Tingkat Pendidikan menunjukkan  $0,333 > 0,05$  artinya menolak hipotesis ke-3, dengan demikian tingkat pendidikan masyarakat desa Tanjung Perada tidak memiliki korelasi terhadap persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan desa. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan tentang persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan desa antara masyarakat yang berpendidikan rendah dengan yang lebih tinggi. Kemudian didukung dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki korelasi terhadap persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan desa Tanjung Perada.
- d. Secara umum berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif pada desa Tanjung Perada sudah akuntabel dan transparan melihat dari adanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan keuangan desa dan publikasi dalam bentuk pemasangan spanduk, pengumuman saat diadakannya rapat dan publikasi melalui media yang telah disediakan mengenai kegunaan dana desa beserta kinerja yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan kepada masyarakat membuktikan bahwa Desa Tanjung Perada telah transparan dalam menyampaikan pertanggungjawaban keuangan desa. Kemudian, aparat desa selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan, mereka diberikan kesempatan untuk menanyakan pertanyaan seputaran penggunaan dana desa dan laporan yang disampaikan aparat desa, masyarakat juga diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat serta kritikan saat rapat berlangsung dengan demikian masyarakat dapat menilai akuntabel dan transparannya pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa.

## **5.2 Keterbatasan**

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pengisian kuesioner dari responden tidak menghindari bias sosial dari respon.
- b. Persepsi masyarakat hanya dilihat dari faktor eksternal yakni penafsiran, objek dan keadaan.
- c. Responden terbatas hanya pada 1 (satu) desa saja, yaitu Desa Tanjung Perada.

### 5.3 Saran

Berikut adalah saran-saran untuk perbaikan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya yaitu :

- a. Memperluas cakupan penelitian pada desa-desa lainnya yang ada didalam kecamatan Tempunak.
- b. Mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel yaitu mengenai perencanaan pelaksanaan keuangan desa.
- c. Meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi.
- d. Pemerintah Desa Tanjung Perada diharapkan lebih transparan kepada masyarakat dalam hal jumlah anggaran secara keseluruhan, realisasinya, dan sisanya, sehingga masyarakat mengetahui sejauh mana anggaran tersebut telah dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, N. (2019). PERSEPSI MASYARAKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAMAHALA JAYA KECAMATAN ADONARA TIMUR, KABUPATEN FLORES TIMUR. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 6(02), 67-77.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Journal Of Accounting And Finance Studies*, 2(1), 63-76.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 46-62.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan
- Bawono, I. R. (2019). Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Beka, M. K., & Handayani, N. (2022). Analisis Akuntansi Keuangan Desa Pada Kantor Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 11(5).
- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 10(5).
- Costari, N., & Belinda, P. A. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58-77.
- Dewi, D. E. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa: Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang (*Doctoral Dissertation*).
- Desa, T., & Kabupaten, D. I. (2019). 3749-Article Text-12520-1-10-20200303. 03.
- Fanani, A. F., Astutik, W., & Wahyono, D. (2014). ANALISIS UNDANG-UNDANG DESA. 1945, 1-14.
- Deti Kumalasari (2019) *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Kurniawan, M. F. (2020). Penerapan Akuntansi Desa Dalam Pengelolaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

- Kurniasari, M. A. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdesa) (Studi di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang) (*Doctoral dissertation*).
- Mubarak, M. (2022). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 200-210.
- Sutisna, S. A., & Widyawati, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 11(10).
- Sutisna, Szahra Aisyah; Widyawati, Dini. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 2022, 11.10.
- Parhusip, P. T., & Girsang, C. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi". *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 136-154.
- Gustiansyah, M. R. (2023). Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. *Hakim*, 1(3), 46-52.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program Spss*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah*

- Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono, P. D. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Tarmizi, R., & Bugawanti, N. L. S. (2013). Pengaruh Persepsi Pengusaha Kecil Dan Menengah Terhadap Penggunaan Sak Etap Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Sentra Kripik Segalamider Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*
- Sarosa, S. 2017. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Edisi Kedua*. Jakarta: Pt Indeks.
- Setiyani Et Al. 2021. Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Pemerintahan Desa. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(2), 72-82.
- Smith J.A, 2009. *Psikologi Kualitatif: Panduan Praktis Metode Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Herdianto, M. A. (2018). Mekanisme, Pelaksanaan, Dan Manfaat Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- S R, Soemarso. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugihastuti, I. H. S. 2007. *Gender & Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:

- Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian : Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Susanto, N. H. 2015. Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki. *Muwazah*, 7(2).
- Wicaksono, K. W. 2015. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*. 19(1), 3-12.
- Nurbia, N., Nadir, M., & Aziz, R. (2020). Persepsi Masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa Terkait Pembangunan Infrastruktur di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Pegguruang*, 2(2), 285-288.
- Gustiansyah, M. R. (2023). Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. *Hakim*, 1(3), 46-52.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan kinerja pengelolaan keuangan desa: Studi pada kecamatan Gandapura kabupaten Bireuen Aceh. Muhammadiyah University Yogyakarta.
- Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Tranparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governace. *Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Nekonomi, Universitas Negeri Semarang*.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi
- Siregar, M. C., & Maryanah, T. (2022). FENOMENA MONEY POLITICS DAN PEMBUKTIAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF (TSM) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 141-158.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1).
- Utami, S., & Rambe, I. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi



Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Percut Sei Tuan (Doctoral dissertation, UMSU).

LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Penerbit LAN

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah. No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah. No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

